

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri

Taufik Nurrochman*¹, Farid Muhammad², Harsono³, Suyatmini⁴

¹²³⁴ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta Indonesia

e-mail: q100220007@student.ums.ac.id¹, q100220008@student.ums.ac.id², har152@ums.ac.id³, suy276@ums.ac.id⁴


Submitted: 12-12-2022

Revised : 18-01-2023

Accepted: 10-02-2023

ABSTRACT. *This study aims to describe the management of Regular School Operational Assistance (BOS) funds at SD Negeri 2 Sawahan, Boyolali Regency, starting from planning, implementation and accountability as well as reporting on the use of regular BOS funds by School Management. This research uses a descriptive qualitative approach, the source of this research is the school principal and BOS treasurer. Data collection uses direct interview techniques, field observations, and documenting the results. Data were analyzed using several stages starting from collecting data, sorting data by reduction, presenting data, and verifying the correctness of data. The results of data analysis concluded that the management of Regular School Operational Assistance (BOS) funds at SD Negeri 2 Sawahan had been carried out in accordance with the Technical Guidelines for the Use and Accountability of School Operational Assistance Funds for Elementary Schools in 2022, but in practice there were still obstacles such as delays in the distribution of BOS funds, discrepancies and lack of coordination in reporting BOS funds that must be corrected immediately.*

Keywords: *School Operational Funds (BOS), Elementary School, School Management.*

 <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.331>

How to Cite Nurrochman, T., Muhammad, F. ., Harsono, & Suyatmini, (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 60-70.

PENDAHULUAN

Salah satu prioritas penting pembangunan nasional adalah peningkatan mutu dalam bidang pendidikan, oleh karena itu diperlukan dorongan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas bagi masyarakat. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun 2005, merupakan bentuk upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan bagi masyarakat yang meliputi pendidikan dasar dan menengah atau SD dan SMP bagi semua warga negara (Muryati, 2016). Dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9 tahun), pemerintah melalui program BOS membebaskan biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain (Kusno et al., 2013). Bantuan operasional sekolah merupakan program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dana bantuan operasional sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang semuanya terdapat pada petunjuk teknis (juknis) mengenai pengelolaan Dana BOS reguler tahun 2022 yang diatur dalam Permendikbudristek (2022) Nomor 2 tahun 2022 oleh Kemendikbud

sebagai pihak yang bertanggungjawab secara teknis dalam pengelolaan program dana bantuan operasional sekolah BOS Reguler (Kemendikbud, 2022).

Pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan implementasi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun (Sari et al., 2021). Wajib belajar pada pendidikan dasar adalah gratis dan tanpa dipungut biaya sedikitpun karena penyelenggaraannya dijamin oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, serta masyarakat karena merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam undang-undang (Juknis Penggunaan Dana BOS tahun 2022). Melalui undang-undang tersebut pemerintah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat terutama peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD dan SMP) dan satuan pendidikan lain yang sederajat (Widyatmoko & Suyatmini, 2017). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2022 diatur dalam Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022, yang membagi dana BOS menjadi dua yaitu dana bos reguler dan dana bos kinerja. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler merupakan dana bos yang diperuntukan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) kinerja pengalokasiannya diperuntukan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang memiliki kinerja baik atau sekolah yang berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

Besaran alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler yang diberikan kepada sekolah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik di sekolah tersebut (Isnaini et al., 2021). satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah ditetapkan oleh menteri, dan peserta didik yang dimaksud merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada satuan pendidikan penerima dana BOS reguler berdasarkan data Dapodik per-tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Apabila penerima dana BOS reguler memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60, maka jumlah peserta didik untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOS reguler ditetapkan sejumlah 60 peserta didik. Penggunaan dana BOS reguler diperuntukan antara lain untuk penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia dan pembelajaran dan masih banyak lagi penggunaan dana bos yang peruntukannya untuk meningkatkan kualitas sekolah.

Sangat disayangkan apabila dikaji dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang harus dihadapi pemerintah dalam melaksanakan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat. Kendala tersebut berkaitan dengan keterbatasan dana yang tersedia bagi pendidikan, ketimpangan kesempatan pendidikan, dan rendahnya kualitas pendidikan (Manurung, 2013). Apabila kita melihat dalam pelaksanaannya, kendala paling banyak terjadi pada terbatasnya anggaran penyelenggaraan pendidikan yang merupakan titik vital yang perlu menjadi fokus dan sorotan, karena anggaran yang terbatas akan menghambat program-program yang sudah dirancang untuk peningkatan kualitas pendidikan (Hidayat et al., 2019). Anggaran yang terbatas juga akan berdampak pada kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhannya, yang berakibat pada program sekolah yang tidak bisa terlaksana, oleh karena itu sekolah harus berpikir ulang dalam mengelola keuangan agar kegiatan belajar-mengajar dapat terlaksana dengan baik (Sucika & Suprpta, 2018).

Hambatan yang terjadi dalam mengelola keuangan terutama di sekolah dasar biasanya adalah minimnya pembukuan setiap transaksi yang terjadi, jadi setiap item atau transaksi tidak dicatat dalam pembukuan dengan benar atau bahkan tidak dicatat sama sekali sehingga hal ini akan membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi riil yang sebenarnya (Silele, 2017). Selain itu hambatan lain yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, terkadang perencanaan dana BOS yang dibuat pada RKAS tidak dijalankan dengan semestinya yang berakibat pada laporan keuangan yang tidak menyatakan yang sebenarnya. Tidak optimalnya pengelolaan dana BOS oleh sekolah perlu menjadi evaluasi perlunya perbaikan dalam hal pengelolaan, misalnya saja menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, dan pembukuan setiap transaksi yang terjadi agar dana BOS dapat dikelola dengan baik oleh sekolah. Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS (Mulyono, 2015). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan Implementasi dari manajemen berbasis sekolah (MBS), melalui MBS diharapkan sekolah dapat mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel, yang berarti ada keterbukaan dari pihak sekolah dari segi pengelolaan dan juga pelaporan dana BOS reguler kepada masyarakat maupun pemerintah (Mushthofa et al., 2022). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas sekolah kepada publik maupun pemerintah, yang merupakan bentuk kontrol yang bertujuan untuk penyelenggaraan pendidikan yang lebih sehat. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan sumberdaya yang ada dalam program BOS (Rahayuningsih, 2020). Pentingnya pengelolaan dana BOS yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi permasalahan penting dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang harus segera diselesaikan, karena sekolah pada umumnya tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat, sehingga transparansi dan pertanggungjawaban sekolah hanya terkesan sebagai formalitas yang harus dijalankan (Kaswandi, 2015). Dengan laporan penggunaan dana BOS yang tidak dipublikasikan oleh sekolah, dan dengan tidak adanya audit oleh akuntan publik, menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran sekolah akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS (Fitri, 2014). Untuk itu dalam pengelolaan dana BOS perlu adanya evaluasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS, agar dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Juknis dan tidak terjadi kebocoran atau penyalagunaan dana BOS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di SD Negeri 2 sawahan Boyolali, mulai dari perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS dan pertanggungjawaban dana BOS, apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) tahun 2022 tentang penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional di sekolah dasar. Tujuan yang lain dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS Reguler di sekolah dasar, dan bagaimana solusinya. pengelolaan dana BOS di sekolah dasar merupakan permasalahan yang di angkat oleh penulis karena regulasi pemerintah hampir setiap tahun mengalami perubahan tentunya menjadi kurang relevan jika menggunakan literatur penelitian terdahulu, untuk itu penelitian ini sebagai

pelengkap dari penelitian terdahulu. Pengelolaan dana BOS di sekolah dasar sekarang ini sudah berbasis komputer dan dalam pelaporannya sudah berbasis online, mulai dari penggunaan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS), sampai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara online, tentu saja ini menjadi perhatian penting karena metode dan regulasi baru butuh penyesuaian, dan tidak terkecuali akan banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Melalui penelitian ini saya ingin mendeskripsikan pengelolaan dana BOS di sekolah dasar dan hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan juknis pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2022, dengan memberikan insentif yang dapat mendukung perkembangan pengelolaan dana BOS terutama di sekolah dasar ke arah yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi yang hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian, peneliti berupaya memahami dan mengkaji fenomena atau peristiwa, orang, objek, atau proses yang terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali. Dalam penelitian Bungin (2009) menjelaskan bahwa obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi, atas dasar situasi, kondisi atau keadaan dan variabel yang timbul di masyarakat yang merupakan tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang lebih memberikan tekanan kepada pemahaman dan makna, berkaitan erat dengan nilai-nilai tertentu, lebih menekankan pada proses pada pengukuran, mendeskripsikan, menafsirkan, dan memberi makna tidak cukup dengan penjelasan belaka, serta memanfaatkan multimetode dalam penelitian (Sutama, 2015). Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kutipan data, gambar kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau peristiwa yang diamati. Moloeng (2008) menyatakan “Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya”. Penelitian dilakukan melalui penyelidikan dan pengamatan semua objek yang diteliti dengan mengungkapkan semua fakta yang ada pada saat penelitian berlangsung, mengenai pengelolaan dana BOS di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali (Sukmadinata, 2010).

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung, observasi lapangan, dan mendokumentasikan hasil. Data dianalisis menggunakan beberapa tahapan mulai dari mengumpulkan data, memilah data dengan cara mereduksi, menyajikan data, dan memverifikasi kebenaran data. triangulasi sumber dipilih untuk pengujian keabsahan data. Etnografi dipilih metode pendekatan dalam penelitian ini. Peneliti turun langsung ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan fokus penelitian yang berhubungan dengan evaluasi pelaksanaan program BOS di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali. Data yang dihimpun sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi, dokumen dan peristiwa yang diobservasi. Dalam kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melakukan kegiatan wawancara mendalam, mencatat dan mengamati objek-objek yang terkait dengan fokus penelitian (Arikunto & Suharsimi, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan lokasi penelitian di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali dilandasi karena ketertarikan penulis terkait pengelolaan dana BOS di sekolah dasar tersebut yang dalam pelaksanaannya sudah sangat baik, dari segi pelaporan yang jarang terlambat, dan tidak pernah mendapat teguran dari dinas terkait dengan pengelolaan dana BOS. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara yang mengelola dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan diperoleh informasi terkait dengan SD Negeri 2 Sawahan Boyolali. Diantaranya adalah SD Negeri 2 Sawahan Boyolali tidak masuk dalam pelaksana program sekolah penggerak sehingga dana BOS yang diperoleh hanya dana BOS Reguler saja, Jumlah siswa pertahun 2022 berjumlah sebanyak 99 siswa.

Perencanaan sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali, yang dilakukan pertama-tama adalah mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam dapodik sesuai dengan kondisi *riil* di sekolah. Kemudian sekolah akan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), yang dilakukan pada awal tahun pelajaran, dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh Bendahara BOS, Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dana BOS, komite dan dewan guru. Sebelum menyusun RKAS biasanya diawali dengan melakukan evaluasi sekolah tentang kendala, hambatan ataupun kekurangan dalam pengelolaan dana tahun sebelumnya dan bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk memperbaikinya, kemudian dalam rapat RKAS juga mengidentifikasi apa saja kebutuhan sekolah dalam satu tahun kedepan dan bagaimana pengelolaan dana akan dilakukan. Dalam proses penyusunan RKAS oleh tim manajemen bos sekolah, guru, dan komite sekolah membuka dialog dengan menerima masukan dan saran dari semua anggota yang hadir dalam rapat RKAS tersebut. Diharapkan dengan keterbukaan sekolah dalam menerima kritik dan saran dalam penyusunan RKAS, dana BOS dapat dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam proses belajar-mengajar. Adanya respon positif dan komitmen bersama dari seluruh komponen sekolah memberikan efek positif dalam kemajuan sekolah.

Setelah melakukan evaluasi diri sekolah dan mencatat apa saja kebutuhan sekolah untuk tahun ajaran baru, selanjutnya yang dilakukan adalah merencanakan anggaran dari masukan yang diterima pada saat rapat, kemudian dari perencanaan tersebut tim pengelola dana BOS menjelaskan kepada peserta yang hadir dalam rapat pengelolaan dana BOS di sekolah tentang hasil dari RKAS. RKAS yang sudah tersusun kemudian dipajang di papan pengumuman sekolah atau ditempat yang mudah dibaca sehingga semua warga sekolah bisa mengetahui rencana anggaran untuk satu tahun kedepan. Sebenarnya dalam perencanaan dana BOS pemerintah telah meluncurkan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), aplikasi ini sudah digunakan dan diterapkan dalam manajemen pengelolaan dana BOS di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali. Dalam penerapannya di SD Negeri 2 Sawahan sudah dijalankan dengan baik seperti RKAS yang sudah dibuat dan disahkan akan diinput dalam aplikasi ARKAS oleh pengelola dana BOS reguler di sekolah.

Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler

Kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKAS, yang merupakan kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, bendahara, komite sekolah dan perangkat pengelola dana BOS reguler, harus mengesahkan hasil kesepakatan tersebut secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan harus ditanda tangani oleh peserta rapat yang hadir. RKAS pengelolaan dana BOS reguler yang sudah jadi dan disahkan akan diterapkan dalam pelaksanaan dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) reguler, yang dalam teknisnya akan mendanai kegiatan-kegiatan demi menunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah dasar.

Dalam pengelolaan anggaran di SD Negeri 2 Sawahan didapatkan hasil bahwa pengelolaan dana sudah dilakukan dengan semestinya, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang muncul atau kebutuhan tak terduga, hal ini disebabkan karena dalam perencanaan penggunaan dana BOS reguler masih ada yang belum tercatat, atau dalam mengestimasi kebutuhan sekolah masih ada yang terlewat, selain itu ada kebutuhan yang tak terduga yang tidak bisa sepenuhnya tercover oleh dana BOS reguler, karena akan mengganggu kegiatan lain yang didanai oleh dana BOS. Penyebab lain adalah biasanya kepala sekolah hanya menugaskan guru yang tidak tau kondisi sebenarnya dari kebutuhan sekolah, hal ini biasanya dilakukan oleh guru olahraga. Faktor lain yang menjadi perhatian yang harus diperbaiki adalah guru yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS tidak mencatat transaksi yang terjadi secara langsung, tetapi menunggu sampai akhir semester, ini menyebabkan terjadinya banyak kesalahan transaksi, dan ujungnya pada terlambatnya laporan keuangan kepada bendahara BOS.

Dalam pelaksanaannya terkadang anggaran dalam BOS tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah padahal dana BOS berikutnya belum cair. Dalam menangani kasus tersebut biasanya di SD Negeri 2 Sawahan mengambil kebijakan atas persetujuan kepala sekolah untuk meminjam ke pihak ketiga sejumlah dana guna menutupi kebutuhan tersebut. Pihak ketiga disini adalah koperasi yang dikelola oleh PNS di kecamatan tempat sekolah ini bernaung yaitu koperasi Rukun Bahagia.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler

Laporan hasil pertanggungjawaban dari penggunaan dana BOS di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali dikelola dan dilaporkan oleh bendahara sekolah, bendahara sekolah membuat SPJ sesuai transaksi yang terjadi setiap hari, atau sesuai penggunaan yang dilakukan dalam perencanaan di RKAS dana BOS reguler yang sudah di sahkan bersama sebelumnya. Dalam pencatatan transaksi setiap hari sebenarnya sekolah sudah menggunakan ARKAS sehingga hanya menginput data saja sesuai transaksi yang terjadi dalam penggunaan dana BOS reguler, karena di ARKAS dapat membantu dalam membuat perencanaan, melakukan pergeseran perencanaan dana BOS, dapat melaporkan hasil realisasi belanja dari perencanaan dana BOS, mempercepat proses pelaporan penggunaan dana BOS, sudah terintegrasi dengan Dapodik dan memastikan laporan yang dibuat sesuai dengan pengaturan di daerah karena format laporan ARKAS sudah merujuk pada PERMENDAGRI 24/2020.

Dalam pelaporan dana BOS Reguler di SD Negeri 2 Sawahan masih menggunakan dua metode secara online dan offline, secara offline yaitu dengan membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak, sedangkan pelaporan secara online yaitu dilaporkan dalam situs yang sudah disiapkan Kemendikbud yaitu www.bosonline.kemdikbud.com guna memudahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sekolah. Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 2 Sawahan sudah berjalan dengan baik dan sesuai juknis yang berlaku, sampai saat ini belum ada evaluasi, teguran maupun kesalahan fatal dalam pelaporan pengelolaan dana BOS Reguler yang dilakukan SD Negeri 2 Sawahan.

Dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS Reguler di SD Negeri 2 Sawahan dalam tata kelola dana BOS membuat beberapa laporan yaitu RAKS, Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh kepala sekolah kemudian, Buku kas umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Kas Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, dan Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS (barang habis pakai dan

barang modal/aset). Dalam pelaksanaannya pembuat laporan dana bos harus memahami laporan tersebut agar dalam pelaporannya bebas dari kesalahan dan sesuai dengan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh sekolah. Karena dana bos diberikan tiga kali dalam 1 tahun maka secara triwulan sekolah harus bertanggungjawab membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler, untuk keperluan audit dan monitoring penggunaan dana BOS Reguler, serta laporan tahunan untuk diserahkan ke SKPD.

PEMBAHASAN

Dalam perencanaan pengelolaan dana BOS reguler di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali sudah dilakukan dengan baik oleh manajemen sekolah dan pengelola dana BOS, mulai dari pemutakhiran data Dapodik agar data yang ada mencerminkan kondisi sebenarnya dari sekolah yang bertujuan agar dalam penerimaan dana BOS tepat sasaran dan sesuai jumlah yang dibutuhkan. Dalam pembuatan dan perencanaan RKAS di SD Negeri 2 Sawahan juga sudah sangat baik, manajemen Sekolah dan Pengelola dana BOS melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite sekolah dan dewan guru dalam perencanaan RKAS. Dalam perencanaan RKAS juga sudah dilakukan dengan mengevaluasi hambatan yang terjadi ditahun sebelumnya, dan merencanakan strategi serta mengestimasi kebutuhan 1 tahun kedepan dalam pengelolaan dana BOS. Sekolah juga terbuka terhadap saran dan masukan terkait pengelolaan dana BOS, dari saran dan masukan tersebut akan dibuat perencanaan anggaran untuk satu tahun kedepan. Anggaran yang sudah jadi kemudian akan disosialisasikan dan disahkan, yang kemudian akan ditempel di tempat yang mudah terlihat agar warga sekolah bisa tau dan mengerti tentang rencana anggaran sekolah, ini juga merupakan bentuk transparansi sekolah dalam pengelolaan dana BOS. RKAS yang sudah disahkan akan diinput dalam ARKAS yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan dana BOS, ARKAS merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Dengan sistem yang terdistribusi diharapkan berbagai pihak yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Capaian output terakhir yang diberikan sistem informasi ini adalah pelaporan, dimana setiap report yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan pemerintah. sesuai dengan penelitian Widyatmoko & Suyatmini (2017), hasil penelitiannya adalah proses perencanaan dana BOS melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara sekolah, dewan guru, dan Komite sekolah, diawali dengan menyusun RKAS. Demikian halnya dengan penelitian Kahavizakiriza et al. (2015), yang menyatakan bahwa sekolah bergantung pada dana dari pemerintah dan tidak ada dana yang dihasilkan dari mereka sendiri, penyusunan anggaran dilakukan oleh Kepala Sekolah dan bendahara sekolah, pemantauan dan pengawasan anggaran sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah dan pengawas, persetujuan anggaran itu terutama dilakukan pada saat akhir penyusunan Anggaran. Dalam penelitian Hsuan-fu (2010), menyatakan bahwa pemerintah perlu menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan dana dan anggaran sekolah, dan sekolah juga harus meningkatkan sistem audit anggaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekolah. Dalam penelitian Kiprono et al. (2015), yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan pengelolaan dana pendidikan gratis yang efektif dan efisien diperlukan sarana untuk mengembangkan diri bagi pengelola dana di berbagai bidang yang bertujuan agar mereka memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan dana di sekolah, sekolah juga harus mengerti dan mendukung kebutuhan mereka karena kapasitas pengelola dana dibatasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka miliki untuk itu sarana penunjang menjadi hal

penting yang harus disediakan oleh sekolah dalam mendukung kompetensi dalam pengelolaan dana BOS.

Pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 2 Sawahan sudah dilakukan dengan baik akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan yang terjadi. RKAS yang sudah disahkan akan digunakan dalam pelaksanaan dana BOS di sekolah, dana BOS yang tersedia akan digunakan untuk mendanai kebutuhan sekolah dalam mendukung kegiatan-belajar-mengajar meliputi penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia dan pembelajaran dan masih banyak lagi penggunaan dana bos yang peruntukannya untuk meningkatkan kualitas sekolah, yang mengacu pada 8 standar proses dan 12 Item komponen penggunaan dana BOS yang menunjang peningkatan kemajuan dan mutu sekolah. Dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS tentunya tidak akan lepas dari hambatan dan itu yang terjadi di SD Negeri 2 Sawahan, hambatan yang terjadi antara lain terkait dengan rencana penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya karena adanya kesalahan kordinasi dalam perencanaan kebutuhan atau munculnya kebutuhan tak terduga, yang pada akhirnya banyak kebutuhan yang tidak tercover dana BOS. Selain itu adanya transaksi yang tidak tercatat secara langsung ataupun tidak dicatat oleh guru penanggungjawab kegiatan yang pada akhirnya menjadi masalah, Permasalahan yang lain adalah dana BOS yang cair terlambat hal ini menyebabkan kegiatan sekolah menjadi terhambat karena anggaran yang tidak mencukupi. Anggaran dana BOS yang tidak mencukupi tentunya menjadi suatu masalah, oleh karena itu sekolah harus meminjam dana dari pihak lain misalnya melalui koperasi PNS. Dalam pelaksanaannya di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali, kepala sekolah selalu mengharapkan guru dan perangkat pengelola dana BOS reguler di sekolah senantiasa mematuhi dan mengupayakan penggunaan dana BOS sesuai dengan RKAS yang telah disusun bersama oleh komponen sekolah mulai dari kegiatan penerimaan dana BOS hingga kegiatan pengeluaran. Sesuai dengan penelitian W. Polachek & Lee (2014), adanya pengaruh antara anggaran ketersediaan dana sekolah pada hasil siswa, karena kebutuhan berbeda-beda dengan kriteria dan karakteristik tertentu yang akan berefek pada pengelolaan anggaran sekolah dan akhirnya akan berimbas pada hasil siswa, baik menunjang ataupun mengurangi kegiatan belajar-mengajar, pengeluaran anggaran tidak bisa menjadi satu-satunya variabel yang mempengaruhi hasil siswa, tetapi masih ada variabel lain yang mempengaruhinya. Menurut penelitian Kenayathulla & Banu (2014), pengelolaan pembiayaan di sekolah dasar dan menengah negeri harus dilakukan seefisien mungkin, karena keterbatasan dana yang hanya bersumber dari dana BOS saja. Karena berfungsinya sekolah adalah karena tercukupinya sumber daya, untuk itu pembuat kebijakan harus tau dan mengerti untuk meningkatkan sistem keuangan sekolah

Dalam pertanggungjawaban dan pelaporan dana BOS di SD Negeri 2 Sawahan sudah sangat baik karena sekolah tersebut juga sudah membuat laporan menggunakan ARKAS yang tentunya akan mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Dalam pelaporan penggunaan juga secara online dan offline, secara offline yaitu dengan membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak, yang akan dilaporkan ke dinas terkait atau SKPD sedangkan pelaporan secara online yaitu melalui www.bosonline.kemdikbud.com. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Aja.N & Nwafukwa (2015), hasil penelitiannya menyatakan bahwa diperlukannya kemampuan akuntansi bagi pengelola dana sekolah sehingga dalam penganggaran, pembuatan dan audit laporan keuangan menjadi lebih mudah dan terhindar dari penipuan keuangan

yang melanda sistem pendidikan. dalam Penelitian Artana et al. (2014), juga dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana BOS sudah sesuai dengan juknis yang berlaku, dan tingkat penggunaan dana BOS di sekolah dasar sudah sangat efektif, kendala yang terjadi ketika penerimaan dana BOS tidak tepat waktu, ini menyebabkan sekolah kekurangan dana dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar dan harus melakukan pinjaman ke pihak ketiga. Dalam penelitian Raharjo & Duta (2013), hasil penelitiannya menjelaskan bahwa di SMP Pawiyatan Surabaya banyak kendala yang terjadi seperti besaran anggaran dana BOS tidak bisa menutupi operasional sekolah padahal perencanaan anggaran sudah sesuai juknis yang berlaku, namun minimnya sosialisasi membuat wali siswa menjadi salah paham terkait penggunaan dana BOS.

KESIMPULAN

Perencanaan pengelolaan dana BOS di SD Negeri 2 Sawahan Boyolali telah dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Sekolah, Bendahara sekolah, Dewan guru, dan Komite sekolah, yang diimplementasikan dalam RKAS yang kemudian diinput dalam Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang bertujuan untuk memudahkan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dana BOS Reguler. RKAS disusun dengan melakukan evaluasi hambatan di sekolah serta mengidentifikasi kebutuhan sekolah dalam satu tahun, setelah itu dibuat perencanaan anggaran, selanjutnya tim mensosialisasikan kepada Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, setelahnya RKAS akan dipajang di papan pengumuman sekolah. Pelaksanaan penggunaan dana BOS sesuai dengan dua belas item tata kelola bos yang telah diatur oleh Pemerintah. Apabila anggaran dalam BOS tidak cukup padahal dana triwulan berikutnya belum cair maka bendahara BOS dengan persetujuan Kepala Sekolah meminjam kepada pihak ketiga seperti Koperasi PNS yang ada di kecamatan tempat sekolah dasar tersebut bernaung. Dalam pelaporan dana BOS Reguler di SD Negeri 2 Sawahan masih menggunakan dua metode secara online dan offline, secara offline yaitu dengan membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang dilaporkan pada SKPD, sedangkan pelaporan secara online yaitu melalui www.bosonline.kemdikbud.com. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS reguler dilakukan oleh bendahara sekolah dengan membuat SPJ sesuai transaksi yang terjadi. Dalam pencatatan transaksi setiap hari sebenarnya sekolah sudah menggunakan ARKAS sehingga hanya menginput data saja sesuai transaksi yang terjadi dalam penggunaan dana BOS reguler. Dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS Reguler di SD Negeri 2 Sawahan yaitu dengan membuat beberapa laporan yaitu RAKS, Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian Buku kas umum, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Kas Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, dan Rekapitulasi Realisasi Belanja Dana BOS (barang habis pakai dan barang modal/aset).

Perencanaan dan pengelolaan dana BOS yang baik belum tentu tidak ada kendala dalam penerapannya. Salah satu permasalahan yang dihadapi SD Negeri 2 Sawahan Kabupaten Boyolali adalah perencanaan dana BOS di RAKS dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi riil kebutuhan sekolah, ketidaksesuaian tersebut terjadi karena kurangnya kordinasi antara guru, bendahara, dan kepala sekolah. Masalah yang lain adalah adanya keterlambatan dalam pencairan dana BOS yang berakibat pada tidak terpenuhinya anggaran dalam kegiatan belajar mengajar, keterlambatan pencairan dana BOS disebabkan oleh SPJ yang harus dilaporkan sekolah terlambat, karena penanggungjawab dalam pengelolaan dana BOS tidak segera membuat laporan penggunaan dana karena tidak mencatat setiap transaksi secara rutin, tentu saja ini akan menyusahkan dalam

pelaporan dan menjadi terhambatnya laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan, hal ini juga diperparah dengan kemampuan tenaga pengelola dana BOS yang terbatas.

REFERENSI

- Aja.N, S., & Nwafukwa, P. (2015). Financial Management Skills Required Of Principals For The Implementation Of The Universal Basic Education Programme In Junior Secondary Schools In Ebonyi State Of Nigeria. *International Journal of Education, Learning and Development*, 3(5), 31–37.
- Arikunto, & Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Artana, M., Hari, I. A., & Bhawa, G. A. S. (2014). Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. *Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(1).
- Bungin, B. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana.
- Fitri, A. (2014). Pegelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selatan Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan. Babana Manajemen Pendidikan*, 2(1).
- Hidayat, R., Burhan, M. R., & Ma'ruf, A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UM Mataram*, 7(2), 93–107.
- Hsuan-fu, H. (2010). The Prospects for the Implementation of School-Based Financial Management in Taiwan. *International Education Studies*, 3(1).
- Isnaini, Aramana, D., & Lewe, A. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Kasus Pada Smp Negeri 3 Babel) Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Soko Guru*, 1(1), 42–52.
- Kahavizakiriza, R., Walela, K. B., & Danstanwanyonyikukubo. (2015). Financial Management In Public Secondary Schools In Kenya: A Case Study Of Lurambi SubCounty Kakamega County. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(9).
- Kaswandi. (2015). Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 027 Tarakan. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 3(1), 66–74. <https://www.google.co.id/#q=jurnal+dana+bos+dari+kaswandi>.
- Kemendikbud. (2022). *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*. Kemendikbud.
- Kenayathulla, & Banu, H. (2014). Future Trends In The Management Of Schools Finance : A Documentary Analysis. *Malaysian Online Journal of Educational Management*, 2(4), 89–110.
- Kiprono, F. J., Nganga, M., & Kanyiri, J. (2015). An Assessment Of School Management Committeesâ Capacity In The Implementation Of Fpe Funds In Public Primary Schools: A Survey Of Eldoret East District, Kenya. *International Journal Of Education And Research*, 3, 243–260.
- Kusno, Suib, M., & Wahyudi. (2013). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Dasar Negeri. *Universitas Tanjungpura*, 2(4). <https://doi.org/10.26418/jppk.v2i4.1890>
- Manurung, H. (2013). Pelaksanaan Program Dana BOS Pada sekolah dasar Yayasan Bina Mitra Wahana Pekanbaru. *Jurnal Kebijakan Umum Universitas Riau*, 4(2), 119–218.
- Moloeng, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya.
- Mulyono. (2015). *Tentang Tujuan Pengelolaan BOS*. Penerbit Rineka Cipta.

- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana Bos Pada Sd Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237–246. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp>
- Mushthofa, A., Munastiwi, E., & Dinana, A. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembinaan pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 64–67. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp>
- Permendagri. (2020). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah : Permendagri Nomor 24 Tahun 2020*.
- Permendikbudristek. (2022). *petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan : Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2022*.
- Raharjo, I. B., & Duta, Y. A. (2013). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah : Studi pada SMP Pawiyatan Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 2(12).
- Rahayuningsih, S. (2020). Management of School Operational Assistance Funds (BOS). *Jurnal Studi Islam Alhamra*, 1(2), 110–117.
- Sari, P., Masyitah, E., & Sari, E. P. (2021). Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Accumulated Journal*, 3(1).
- Silele, E. (2017). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Emba*, 5(2), 1626–1635.
- Sucika, P., & Suprpta, I. N. (2018). Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1).
- Sukmadinata, N. . (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosadakarya.
- Sutama. (2015). *Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Fairuz media.
- W. Polachek, S., & Lee, K.-G. (2014). Do School Budgets Matter? The Effect of Budget Referenda on Student Performance. *IZA Discussion Paper*, 8056.
- Widyatmoko, S., & Suyatmini. (2017). pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SD N Kemasari 1 Surakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2), 153–160.